



Pendampingan E-Government untuk Pemerintah Desa Melalui Pemanfaatan Fitur Google dan Barcode dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

Yuliatin¹, Mariatul Qibtiyah², Utami Mizani Putri³

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia



E-mail: yuliatin@uinjambi.ac.id¹

mariatulqibtiyah@uinjambi.ac.id²

utamimizaniputri@uinjambi.ac.id³

Article Info	Abstrak
Diterima 20 Agustus 2023 Direvisi 29 September 2023 Diterbitkan 3 Oktober 2023	<p>Pelayanan publik prima merupakan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pemerintahan desa-desa yang ada di Kecamatan Bram Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini melihat bahwa desa dapat menerapkan e-government dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan bisa diakses semua orang secara gratis. Dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Para peserta kegiatan PkM ini yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Desa sangat antusias dengan hadirnya workshop ini karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Hasil evaluasi menunjukkan peserta sangat puas apalagi ini merupakan kegiatan perdana di daerah mereka sehingga mereka mengharapkan ada kerjasama lanjutan ke depannya.</p> <p>Kata kunci: Pengabdian, E-Government, Google</p>

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

DOI:

P-ISSN [2686-3839](#) dan E-ISSN [2686-4347](#)

Volume 5 Number 2, December 2023

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa melalui pelayanan publik yang prima. Dalam konteks otonomi, kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung guna memberikan pelayanan publik di wilayah administratif desa (Pakaya, 2016a), sehingga pelayanan publik yang diberikan oleh desa harus memenuhi standar pelayanan prima yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Huda dkk., 2020a). Perwujudan pelayanan prima dapat diwujudkan dengan pemanfaatan aplikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Purwanti & Suharyadi, 2018a). Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan adopsi teknologi informatika di seluruh jajaran pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Perpres ini digitalisasi pelayanan dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima, tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan tentunya transparan (Haryani & Puryatama, 2020a).

Undang-Undang Desa telah mensyaratkan pemerintah desa untuk membentuk sistem pelayanan digital yang disebut dengan *e-government*. Penerapan *e-government* bagi desa diupayakan untuk mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Akan tetapi, penerapan *e-government* ternyata belum dilaksanakan dengan optimal oleh semua desa di Indonesia. Kendala utama penerapan *e-government* antara lain adalah kebijakan penyelenggaraan *e-government* yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan *e-government* kepada pemerintah desa belum optimal. Kemudian, permasalahan lain adalah minimnya sumber daya manusia dan sumber dana pemerintah desa dalam menerapkan pemerintahan digital melalui *e-government*. Tak hanya itu, kendala utama yang dihadapi dalam menerapkan *e-government* adalah infrastruktur internet di pedesaan yang masih belum terjangkau secara merata. Padahal saat era digital saat ini, internet telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Menurut data kemkominfo, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa ternyata masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan belum siap dalam menggunakan layanan digital berbasis *e-government* karena masih terdapat wilayah yang memiliki *blankspot* sehingga tidak bisa mengakses internet. (Wicaksono, 2018).

Implementasi *e-government* bagi pelayanan public merupakan hal yang sangat dinanti mengingat era digitalisasi yang merubah pola hidup Masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan *e-government* yang dapat dengan mudah diakses oleh pemerintah desa adalah melalui pemanfaatan google dan quick response code (QR Code) dalam memberikan pelayanan public kepada Masyarakat. Pemanfaatan fitur ini sangat berguna apalagi di era covid 19 yang membatasi Masyarakat untuk berinteraksi secara langsung guna mendapatkan pelayanan. (Dong dkk., 2022; Schultz, 2013)

Kesenjangan antara cita-cita mewujudkan pelayanan prima sebagai amanat Undang-Undang Desa dengan kenyataan dalam penerapan *e-government* tersebut membutuhkan solusi yang realistis. Sebagai perwujudan prinsip tridharma perguruan tinggi, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan bersama dengan Program Studi Sistem Infomasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menawarkan solusi alternatif pendukung implementasi *e-government* di pemerintahan desa. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa workshop *e-governement* untuk pemerintah desa dengan fitur *Google* guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital.

Workshop e-governement untuk pemerintah desa dengan menggunakan fitur-fitur *Google* dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital. Pelayanan prima diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai muaranya, melalui tercapainya transparansi dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pelayanan. Pengabdian pada masyarakat ini difokuskan pada Desa Bram Itam Raya, Desa Bram Itam Kanan, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulung yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Provinsi Jambi. Desa-desanya ini masih memiliki masalah, khususnya dalam penerapan pemerintahan desa secara umum.

Pemerintahan desa di Desa Bram Itam Raya, Desa Bram Itam Kanan, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulang yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. tersebut masih jauh dari pelayanan prima berbasis *e-government* seperti yang dicita-citakan oleh UU Desa. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa masalah umum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis *e-government* diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan aparat desa tidak datang ke kantor dalam memberikan pelayanan. Masyarakat terbiasa datang ke rumah aparat desa secara langsung untuk mendapatkan pelayanan, sehingga kantor desa tidak berjalan sesuai fungsinya.
2. Masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik mendatangi jasa foto copy untuk mendapatkan blanko formulir yang sudah tersedia di tempat tersebut. Padahal, seharusnya blanko tersedia di kantor desa dan didapatkan secara gratis oleh masyarakat, kondisi ini mempertajam jurang antara kenyataan dengan cita-cita mewujudkan pelayanan prima melalui UU Desa.
3. Penerapan *e-government* di desa-desa yang ada di Kecamatan Bram Itam terkendala jaringan internet, lantaran dari 9 desa yang ada, 5 di antaranya sulit mendapatkan akses sinyal internet atau merupakan wilayah *blankspot*, yaitu di Desa Kemuning, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulang.

Berangkat dari masalah awal di lokasi tersebut, maka perwujudan pelayanan prima dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. Beberapa desa di kecamatan tersebut telah terjangkau jaringan internet dengan baik, sehingga percepatan perwujudan pelayanan prima dapat dilakukan melalui pemerintahan digital atau *e-government*. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah bahwa terdapat kendala dalam penerapan *e-government* bagi pemerintah desa. Berdasarkan pemetaan maka ditemukan tiga ranah masalah dalam penerapan *e-government* di pemerintah desa yaitu:

1. Kewenangan penerapan jaringan internet di seluruh pelosok desa berada pada pemerintah pusat sedangkan kebutuhan pelayanan berbasis digital sangat membutuhkan layanan internet.
2. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan keuangan pemerintah desa dalam mengembangkan alternatif pelayanan publik berbasis digital sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima.
3. Pelayanan publik berbasis digital (*e-government*) masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat lanjut usia sehingga mereka lebih memilih tetap datang langsung ke kantor desa.

Workshop e-governement untuk pemerintah desa dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur *Google* yang sederhana dan dekat dengan masyarakat, sebagai alternatif dari guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital.

Metodologi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan (Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, 2009). PAR merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dalam hal ini, PkM ini mencoba untuk melibatkan masyarakat, yang dalam hal ini aparat pemerintahan desa, untuk melakukan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima berbasis digital kepada masyarakat di desa yang ada di Kecamatan Bram Itam. Sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan

mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan masyarakat atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.

Pendekatan PAR ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang diuraikan dalam *action planning, taking action, observation, reflection and evaluation*. Tipe dalam metode PAR terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. PAR Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PAR Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang mana terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan (*action planning*), pelaksanaan (*taking action*), pengamatan (*observation*), refleksi dan evaluasi (*reflection and evaluation*).

1. Tahap Perencanaan (*Action Planning*). Pada tahap ini, tim PkM menjelaskan tentang apa (*what*), mengapa (*why*), dimana (*where*), kapan (*when*), dan bagaimana (*how*) kegiatan PkM dilakukan. Kegiatan PkM ini dilakukan secara kolaboratif dengan pihak pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di dalam PkM ini, kegiatan pengamatan dilakukan dengan menemui Camat Bram Itam untuk mengobservasi permasalahan yang ada pada pemerintahan desa berkaitan dengan pelayanan public berbasis digital sehingga nantinya kegiatan PkM ini akan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Di dalam tahap perencanaan, tim PkM juga menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian, seperti rencana pelaksanaan kegiatan PkM. Sebelum melakukan kegiatan workshop mengenai “E-Government Untuk Pemerintah Desa Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital”, tim melakukan kegiatan observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi serta bersilatullah dalam menjalin kerja sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra kepada Camat Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal melaksanakan kegiatan workshop e-government selama dua hari dengan peserta dari desa-desa yang ada di Kecamatan Bram Itam. Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Bram Itam, diketahui bahwa terdapat 1 kelurahan dan 9 desa di Kecamatan Bram Itam dan dari 9 desa tersebut ternyata terdapat 5 desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses sinyal internet sehingga hal ini menjadi kendala besar bagi pihak desa untuk menerapkan e-government di desa tersebut. Menurut pihak kecamatan, pengajuan infrastruktur tower sinyal telah disampaikan ke kabupaten sehingga nantinya masyarakat desa dapat mengakses internet di daerahnya. Pihak Kecamatan Bram Itam sangat antusias dalam menyambut kehadiran tim PkM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Hal ini dikarenakan belum pernah ada tim dosen yang pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti ini secara langsung di kecamatan Bram Itam karena pada umumnya pihak perguruan tinggi biasanya hanya bekerjasama dalam hal penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Apalagi materi workshop yang akan disampaikan nanti sangatlah menarik berkaitan dengan e-government dalam mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital. Hal ini dikarenakan memang pelayanan di desa-desa masih bersifat manual. Hasil observasi ini menjadi rujukan utama bagi tim PkM sehingga tim pelaksana mengetahui materi atau isu permasalahan yang perlu dibahas di desa tersebut. Workshop akan dikemas sebagai solusi permasalahan tata kelola pemerintahan yang diperoleh dari studi pendahuluan. Adapun silabus kegiatan PkM ini dapat dilihat dalam table berikut:
2. Tahap Pelaksanaan (*Taking Action*) Pada tahap *taking action* atau pelaksanaan ini, kegiatan PkM dilaksanakan selama dua hari, yaitu di tanggal 29-30 November 2022 sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui *workshop* mengenai “E-Government Untuk Pemerintah Desa Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital”. Pelaksanaan *workshop* ini terbagi menjadi dua materi utama, yaitu materi pertama mengenai “E-Government Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima” dan materi kedua mengenai

“Pemanfaatan Fitur Google Dan *QR Code* Untuk Mendukung E-Government Di Tingkat Desa” Dalam kegiatan PkM ini, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan juga peserta melakukan praktik langsung pemanfaatan fitur-fitur *google* dan juga *QR Code* dalam pelayanan administrative desa. Berdasarkan silabus dan capaian dalam kegiatan PkM yang telah disusun maka dibuatlah jadwal teknis pelaksanaan. *Workshop* dilaksanakan di Balai Kecamatan Bram Itam dengan peserta yang berasal dari desa di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi selama dua hari, yaitu sesi pertama berupa *workshop* yang terdiri dari penyampaian materi mengenai “E-Government Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima” dan dilanjutkan dengan materi “Pemanfaatan Fitur Google Dan *QR Code* Untuk Mendukung E-Government Di Tingkat Desa”. Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan FGD guna membahas mengenai pelaksanaan *e-government* di desa dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh desa dalam mewujudkan *e-government*. Pada sesi kedua pelaksanaan PkM dilanjutkan dengan pelatihan peserta secara langsung terkait pemanfaatan fitur *google* dan juga *QR Code*. Peserta yang telah dihimbau untuk membawa laptop sendiri ini didampingi oleh tim PkM guna mempraktikkan pemanfaatan fitur *google* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian peserta yang melakukan praktik merupakan operator di desanya sehingga sudah *familiar* dalam penggunaan laptop. Namun, terdapat kendala bagi peserta dalam mengakses *google* dikarenakan beberapa peserta tidak memiliki paket data internet sehingga tim PkM memfasilitasi internet melalui *wifi* yang tersambung dari perangkat *handphone* sehingga pelatihan ini pun berjalan lancar.

3. Tahap Pengamatan (***Observation***) Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta dapat dilakukan sendiri oleh tim PkM sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, tim PkM melakukan pendampingan terhadap peserta dalam mempraktikkan materi yang telah disampaikan. Pendampingan dalam tim PkM ini akan membantu peserta yang mengalami kendala pada saat melakukan praktik sehingga peserta dapat memahami materi secara menyeluruh. Pada tahap *observation* ini lebih difokuskan pada sesi kedua, yaitu praktik pemanfaatan fitur *google* dan *QR Code*. Pada sesi ini, peserta didampingi untuk membuat *g-mail* desa kemudian membuat *g-drive* dan dilanjutkan dengan *g-form*, sampai dengan pembuatan *QR Code*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta antusias dalam mempraktikkan materi yang telah diberikan, apalagi peserta juga didampingi oleh tim PkM sehingga peserta merasa terbantu. Beberapa peserta masing-masing mengalami kendala dalam menyambungkan koneksi internet laptop mereka. Selain itu juga, beberapa peserta juga masih merasa asing ketika membuat *g-form* untuk layanan desa yang kemudian di *QR Code* kan. Tahapan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena peserta membuatnya dari fitur awal *google*, yaitu *gmail*. Hal ini dikarenakan beberapa desa masih belum membuat *email* dan beberapa operator masih menggunakan email pribadi untuk. Observasi ini kemudian dilanjutkan sampai para peserta dapat membuat layanan administrative melalui *QR Code*.
4. Tahap Refleksi dan Evaluasi (***Reflection and Evaluation***) Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika tim pendamping kegiatan PkM sudah selesai melakukan pendampingan terhadap peserta dalam melaksanakan praktik. Kegiatan ini berupa *Focus Group Discussion* (FGD) hasil pelatihan *workshop* yang dilakukan oleh tim PkM dan peserta pelatihan. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi berupa survey hasil kegiatan PkM yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, baik tim PkM maupun peserta mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat tim PkM menyampaikan materinya dan memberikan pendampingan dalam praktik pemanfaatan fitur *google* dan *QR Code*. Hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan PkM berikutnya. Sehingga pada intinya, refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan berikutnya. Evaluasi dan refleksi mengenai pelaksanaan kegiatan, peserta melakukan refleksi mengenai pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai *e-government*. Setelah pelatihan selesai, dilanjutkan dengan FGD yang membahas mengenai

evaluasi terhadap ujicoba penerapan hasil workshop untuk perbaikan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) dilakukan dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) yang dihadiri perwakilan desa mitra, yaitu Desa Bram Itam Raya, Desa Bram Itam Kanan, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulung yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kegiatan FGD juga akan mengacu pada hasil evaluasi kegiatan yang diisi oleh peserta *workshop*. Evaluasi dan monitoring merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan target luaran dari kegiatan ini, baik bagi pihak penyelenggara, pelaksana maupun mitra.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu tujuan pengaturan desa berdasarkan pasal 4 mengamanatkan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa melalui pelayanan publik. Dalam konteks otonomi, kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung guna memberikan pelayanan publik di wilayah administratif desa (Pakaya, 2016b), sehingga pelayanan publik yang diberikan oleh desa harus memenuhi standar pelayanan prima yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Huda dkk., 2020b).

Perwujudan pelayanan prima dapat diwujudkan dengan pemanfaatan aplikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Purwanti & Suharyadi, 2018b). Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan adopsi teknologi informatika di seluruh jajaran pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Perpres ini digitalisasi pelayanan dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima, tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan tentunya transparan (Haryani & Puryatama, 2020b), termasuk dalam pemerintahan desa. Kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien ini disebut dengan istilah *e-Government* (Ansyah dkk., 2021). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, *e-Government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan system pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan system pelayanan public yang efektif dan efisien.

Secara umum E-government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan pegawainya atau yang disebut G2E (*Government to Employee*), pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) sebagai mitranya (Pertiwi dkk., 2021; Watrianthos dkk., 2019). Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, kegiatan *workshop* difokuskan pada konsep G2E (*Government to Employee*) dan G2C (*Government to Citizen*). Pengaplikasian *e-government* pada pemerintahan desa dapat menggunakan fitur-fitur google yang dapat diakses secara gratis namun tetap dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Sagala dkk., 2021). Kegiatan PkM ini melihat bahwa desa dapat menerapkan *e-government* dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dan bisa diakses semua orang secara gratis, yaitu dengan mengaplikasikan fitur *google* dan juga *QR Code*. *Workshop e-government* yang dilakukan di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama dua hari ini telah mendampingi operator desa menaafaatkan fitur *google*.

Setelah peserta membuat email desa masing-masing, pendampingan selanjutnya membuat *google drive* yang dapat digunakan sebagai arsip digital desa. Untuk mengisi *g-drive* tersebut, peserta kemudian didampingi menggunakan *google document* dan juga *google spreadsheet* agar arsip desa dapat dikerjakan langsung melalui fitur *google* sehingga nantinya arsip menjadi lebih praktis karena langsung terkoneksi di *google drive*. Pengerjaan dokumen melalui fitur *google doc* ini membuat pekerjaan lebih fleksibel karena data diedit oleh semua orang yang memiliki akses email bersama bahkan penyampaian laporan dengan menggunakan fitur *google* ini dirasa

mampu mengurangi hasil pengecekan secara manual yang mengharuskan mencetak terlebih dahulu menggunakan kertas dan jika harus ada yang diperbaiki maka harus dicetak ulang.

Setelah peserta memanfaatkan fitur *google* untuk digitalisasi arsip administrasi desa maka pendampingan selanjutnya adalah membuat *QR Code*. *QR Code* atau *Quick Respon Code*, merupakan bagian dari barcode yang sudah banyak digunakan pada era teknologi saat ini baik di bidang organisasi pemerintahan maupun swasta. Biasanya *QR Code* digunakan saat pembayaran akan tetapi dikembangkan secara luas untuk fungsi lainnya, seperti untuk administrasi. Tujuan utama dari *QR Code* untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dalam dua langkah mudah, yaitu memindai *QR Code* dan mengambil tindakan baik dalam bentuk membuka browser, menyimpan informasi kontak atau menghubungi nomor di *QR Code* maupun mengisi formulir melalui *QR Code* (Hanafiah & Susanto, 2022; Sihalohe dkk., 2020).

Hasil pendampingan kegiatan PkM merupakan praktik secara teknis yang dilakukan oleh peserta PkM terhadap materi yang telah disampaikan tim PkM. Ini merupakan kegiatan yang simbiosis mutualisme. Tim PkM yang melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi inipun mendapatkan respon yang positif dan partisipatif dari peserta kegiatan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, sampai dengan tahapan evaluasi. Peserta PkM pun mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta dapat mengimplementasikannya dalam pelayanan di kantor desa.

Setelah dilakukan pendampingan, tim PkM melakukan evaluasi dengan memberikan survey berupakan *google form* yang harus diisi oleh peserta kegiatan PkM. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dilaksanakan selama dua hari, terlihat peserta sangat antusias terhadap materi yang telah disampaikan, apalagi kegiatan ini bukan hanya sekedar penyampaian materi saja tetapi juga peserta langsung didampingi untuk mengimplementasikan materi yang telah disampaikan sehingga nantinya peserta dapat mengaplikasikannya pada pelayanan di desa masing-masing. Pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini direspon dengan baik oleh pemerintah Kecamatan Bram Itam karena kegiatan PkM Dosen ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan di kecamatan ini sehingga nantinya pihak kecamatan berencana untuk mengajak bekerjasama kembali dalam memberikan pelatihan *egovernment* di lingkungan desa yang ada di Kecamatan Bram Itam. Meskipun di beberapa desa merupakan daerah *blank spot* karena terdapat kendala yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan internet, namun pihak kecamatan mengakui bahwa kegiatan ini memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan digitalisasi desa yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kesimpulan

Perwujudan pelayanan prima di desa dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang disebut juga dengan *e-government*. Penerapan *e-government* di desa dapat dimulai dengan memanfaatkan fitur-fitur yang mudah diakses melalui internet, salah satunya fitur yang ada di *google* dan juga melalui *quick response code (QR-Code)*. Hal ini lah yang kemudian dijemputani oleh dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Pemanfaatan fitur *google*, dimulai dengan peserta yang membuat *google mail* sebagai basis dalam fitur *google* dan dapat dimanfaatkan untuk surat menyurat, selanjutnya peserta melanjutkan dengan mempraktikkan *google drive* yang dimanfaatkan sebagai arsip digital desa, kemudian peserta dibimbing untuk memanfaatkan *google doc* dan *spreadsheet* untuk membuat data bersama, dan dilanjutkan dengan praktik membuat *google form* untuk buku tamu dan formulir pelayanan online, yang kemudian terakhir dilanjutkan dengan membuat *QR Code* yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi desa. Implementasi *e-government* pada pemerintahan desa melalui fitur *google* dan *QR Code* ini merupakan alternatif guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital. Para peserta kegiatan PkM ini yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Desa sangat antusias dengan hadirnya *workshop* ini karena dapat menambah

wawasan dan pengetahuan mereka, apalagi kegiatan PkM dosen ini merupakan kegiatan perdana di daerah mereka sehingga mereka mengharapkan ada kerjasama lanjutan ke depannya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, serta tim pendamping atas dukungan terhadap pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini baik dalam bentuk kebijakan, tenaga, maupun biaya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi sebagai mitra pelaksanaan program.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Y membuat konsep, merancang kegiatan riset pengabdian, menuliskan pendahuluan, metode, teori, dan hasil penelitian. Sedangkan anggota melengkapi teori, menyiapkan data, menyimpulkan, menambahkan informasi, dan mengedit naskah.

Referensi

- Ansyah, A. B., Wahid, M., & Hartati, H. (2021). Pendampingan Pengembangan Desa Digital Melalui Komunitas Pemuda Di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V2i1.913>
- Dong, S., Chen, F., Ding, W., & Zhou, J. (2022). Prevention And Control Of Covid-19 In Subway Stations: An Optimization Strategy For Placing Location Qr Codes. *Tunnelling And Underground Space Technology*, 127, 104615. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104615>
- Hanafiah, H., & Susanto, B. (2022). Rt Administrative Governance Assistance. 02/027 Tga Housing Block Gm In The Era Of Digitalization. *Indonesian Journal Of Engagement, Community Services, Empowerment And Development*, 2(2), 261–268. <https://doi.org/10.53067/ijcsed.V2i2.67>
- Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020a). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/Kybernan.V1i1.580>
- Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020b). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/Kybernan.V1i1.580>
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020a). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Jurnal Moderat*.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020b). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Jurnal Moderat*.
- Norman K. Denzin Dan Yvonnas S. Lincoln. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Pakaya, J. S. (2016a). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Pakaya, J. S. (2016b). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., Anugrah, E., & Fakultas,). (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi

- Pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139. <https://doi.org/10.55678/Prj.V9i3.508>
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018a). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*.
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018b). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*.
- Sagala, I., Armansyah, Y., Husna, N., & Dastina, W. (2021). Pemanfaatan Fitur Google Untuk Mendukung E-Government Di Tingkat Desa/Kelurahan. *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(3), 113–118. <https://doi.org/10.36339/Je.V5i3.493>
- Schultz, M. K. (2013). A Case Study On The Appropriateness Of Using Quick Response (Qr) Codes In Libraries And Museums. *Library & Information Science Research*, 35(3), 207–215. <https://doi.org/10.1016/J.Lisr.2013.03.002>
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan Umkm Di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287–297. <https://doi.org/10.38043/Jmb.V17i2.2384>
- Watrianthos, R., Parlaungan Nasution, A., Program, M. S., Manajemen, S., Amik, I., & Batu, L. (2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17(1), 53–60. <https://doi.org/10.34010/Miu.V17i1.2239>
- Wicaksono, F. (2018). Dilema Implementasi E-Goverment : Analisis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.

